

# Analisis Kebijakan Fiskal dalam Menjaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Tekanan Inflasi di Indonesia

Syukur Iman Lase<sup>1\*</sup>, Azkavia Rosmayusi<sup>2</sup>, Dewi Puspaningtyas Faeni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama  
syukurlase052@gmail.com\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>

Vol. 4 No. 3 September 2026

Page: 752-760

## Article History:

Received: 04-06-2026

Accepted: 30-06-2026

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kebijakan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi di Indonesia periode 2021–2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan inflasi yang berpotensi menurunkan pendapatan riil dan kemampuan konsumsi rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan, kajian yang secara khusus menyoroti perannya dalam menjaga daya beli masyarakat masih terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dokumen APBN, dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berperan strategis dalam menjaga daya beli melalui belanja perlindungan sosial, subsidi, kompensasi, bantuan sosial, dan penguatan belanja pemerintah. Selama periode penelitian, pertumbuhan ekonomi relatif stabil dikisaran 5%, sedangkan inflasi berfluktuasi sehingga berpotensi menekan konsumsi rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi sekaligus perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

**Kata Kunci** : Kebijakan Fiskal; Daya Beli Masyarakat; Inflasi; Pertumbuhan Ekonomi; Perlindungan Sosial

## PENDAHULUAN

Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari peningkatan Produk Domestik Bruto, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu mempertahankan konsumsi dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa ikut naik, sehingga

pendapatan riil masyarakat dapat mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi masalah serius, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pembahasan mengenai daya beli masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

Secara empiris, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara *year-on-year*. Namun, pada saat yang sama, inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen *year-on-year*. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif tetap perlu diimbangi dengan pengendalian harga agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Apabila inflasi tidak terkendali, maka konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi dapat melemah karena masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan yang sama.

Kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah dapat mengatur belanja negara, subsidi, bantuan sosial, insentif pajak, dan program perlindungan sosial. Instrumen tersebut berfungsi untuk menahan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat, terutama ketika harga pangan, energi, dan kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal tidak hanya berperan sebagai alat pengelolaan anggaran negara, tetapi juga sebagai sarana stabilisasi ekonomi dan perlindungan sosial. Dengan demikian, efektivitas kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kecepatan penyaluran, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh beberapa pandangan utama. Keynes (1936) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga permintaan agregat melalui belanja negara, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan atau perlambatan. Pandangan ini relevan karena daya beli masyarakat sangat berkaitan dengan kemampuan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, Musgrave (1959) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, sedangkan fungsi distribusi berkaitan dengan peran pemerintah dalam mengurangi ketimpangan dan melindungi kelompok rentan. Selain itu, Indrawati, Satriawan, dan Abdurohman (2024) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia setelah pandemi diarahkan secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan fiskal, namun tetap mempertahankan belanja perlindungan sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki hubungan erat dengan stabilitas ekonomi, inflasi, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat. Paramita (2021) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam mengatasi inflasi di Indonesia. Basconcillo (2023) menemukan bahwa dampak kebijakan fiskal terhadap inflasi dan konsumsi

privat tidak selalu bersifat langsung, karena sangat dipengaruhi oleh komposisi belanja pemerintah. Indrawati, Satriawan, dan Abdurohman (2024) juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal Indonesia pascapandemi diarahkan secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi tetap mempertahankan fungsi perlindungan sosial.

Selain itu, beberapa penelitian terbaru menyoroti pentingnya belanja perlindungan sosial dan bantuan sosial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Suryahadi, Al Izzati, dan Yumna (2021) menunjukkan bahwa program perlindungan sosial berperan dalam menahan peningkatan kemiskinan selama pandemi. Noerkaisar (2021) menekankan bahwa efektivitas bantuan sosial sangat ditentukan oleh ketepatan penyaluran dan kualitas implementasi. Damai dan Aprianti (2024) menemukan bahwa belanja pemerintah pada sektor pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan belanja sektor ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara langsung. Handayani, Sugianto, dan Saputra (2025) juga menunjukkan bahwa kebijakan fiskal perlindungan sosial berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia dan peningkatan pendapatan kelompok rumah tangga melalui pendekatan *Computable General Equilibrium*.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar kajian lebih berfokus pada hubungan kebijakan fiskal dengan inflasi, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, atau stabilitas makro, sedangkan pembahasan yang secara khusus mengaitkan kebijakan fiskal dengan upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis bagaimana instrumen fiskal, seperti belanja perlindungan sosial, subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial, digunakan pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat Indonesia pada periode 2021–2026.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada perlunya kajian yang secara spesifik menganalisis peran kebijakan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi, bukan hanya melihat kebijakan fiskal sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi atau pengendalian defisit. Penelitian ini diperlukan karena daya beli masyarakat merupakan aspek penting yang secara langsung berhubungan dengan kesejahteraan rumah tangga, tingkat konsumsi, dan ketahanan ekonomi nasional. Ketika inflasi meningkat, masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah, menghadapi tekanan karena harga kebutuhan pokok naik lebih cepat dibandingkan kemampuan pendapatannya. Dalam kondisi tersebut, kebijakan fiskal perlu dianalisis bukan hanya dari sisi jumlah anggaran, tetapi juga dari fungsi perlindungannya terhadap konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia selama periode 2021–2026? Bagaimana kebijakan fiskal pemerintah melalui belanja perlindungan sosial, subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat? serta sejauh mana kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan perlindungan sosial di tengah tekanan inflasi? Rumusan masalah tersebut penting untuk dijawab agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah

mengenai hubungan antara inflasi, daya beli masyarakat, dan respons fiskal pemerintah.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia selama periode 2021–2026, mengidentifikasi bentuk-bentuk kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, menganalisis peran belanja perlindungan sosial, subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi bagi rumah tangga. Serta menjelaskan fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan perlindungan sosial. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan fiskal dan memberikan manfaat praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan daya beli masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan berbasis pada data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hubungan kausal secara statistik, tetapi menjelaskan secara mendalam peran kebijakan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data makroekonomi, dokumen fiskal, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, perlindungan sosial, subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial.

Data penelitian diperoleh dari dokumen resmi Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, dokumen APBN, laporan perekonomian, siaran pers resmi, serta artikel ilmiah yang relevan. Periode 2021–2026 dipilih karena mencerminkan dinamika penting perekonomian Indonesia, mulai dari pemulihan pascapandemi, meningkatnya tekanan inflasi, normalisasi ekonomi, hingga arah kebijakan fiskal terbaru. Data tahun 2026 diperlakukan sebagai data berjalan berdasarkan publikasi resmi yang tersedia, sehingga tidak ditafsirkan sebagai data tahunan penuh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, memilih, dan mengkaji dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan langsung dengan kebijakan fiskal, inflasi, daya beli masyarakat, dan perlindungan sosial. Data kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami dan menjelaskan fenomena kebijakan fiskal secara kontekstual, bukan menguji hubungan kausal secara statistik (Creswell & Poth, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi karena sumber utama penelitian berupa dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga, dan artikel ilmiah yang relevan (Bowen, 2009). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Untuk memperkuat keabsahan data,

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi data, dan triangulasi teori sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan triangulasi Denzin (1978).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.** Data Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Kebijakan Fiskal Indonesia

Tahun/ Periode	Pertum- buhan Ekonomi (%)	Inflasi Tahunan / y-on-y (%)	Anggaran Perlindung- an Sosial (Rp triliun)	Keterangan Kebijakan Fiskal
2021	3,70	1,87	408,8	Kebijakan fiskal diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan kelompok rentan setelah tekanan pandemi.
2022	5,31	5,51	431,5	Inflasi meningkat cukup tinggi sehingga APBN berperan sebagai bantalan melalui belanja perlindungan sosial dan subsidi.
2023	5,05	2,61	476,0	Pemerintah melanjutkan reformasi perlindungan sosial serta penguatan bantuan bagi masyarakat berpendapatan rendah.
2024	5,03	1,57	496,8	Program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan data dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
2025	5,11	2,92	503,2	Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga daya beli, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat perlindungan sosial adaptif.
2026	5,61	3,08	508,2	APBN 2026 diarahkan untuk menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi, perlindungan sosial, dan program prioritas pemerintah.

Sumber: BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, diolah peneliti.

Hasil penyajian data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2021–2025 bergerak dalam pola pemulihan dan relatif stabil. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,70 persen, kemudian meningkat menjadi 5,31 persen pada 2022. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5 persen, yaitu 5,05 persen pada 2023, 5,03 persen pada 2024, dan 5,11 persen pada 2025. Pada Triwulan I-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen secara year-on-year. Temuan ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki ketahanan yang cukup baik, meskipun berada dalam situasi global yang tidak selalu stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi yang positif tidak secara otomatis menjamin terjaganya daya beli masyarakat apabila tekanan harga tetap terjadi.

Dari sisi inflasi, data menunjukkan bahwa tekanan harga mengalami fluktuasi. Inflasi pada 2021 tercatat sebesar 1,87 persen, kemudian meningkat cukup tajam menjadi 5,51 persen pada 2022. Kenaikan inflasi pada 2022 menjadi titik penting karena menunjukkan adanya tekanan harga yang dapat melemahkan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Setelah itu, inflasi menurun menjadi 2,61 persen pada 2023 dan 1,57 persen pada 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 2,92 persen pada 2025. Pada Mei 2026, inflasi *year-on-year* tercatat sebesar 3,08 persen. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi secara umum masih dapat dikendalikan, tekanan harga tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena berhubungan langsung dengan kemampuan konsumsi masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya anggaran perlindungan sosial dari Rp408,8 triliun pada 2021 menjadi Rp503,2 triliun pada 2025, dan dialokasikan sebesar Rp508,2 triliun pada 2026. Peningkatan anggaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan fiskal pemerintah. Program perlindungan sosial, bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi berfungsi sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial melalui perlindungan terhadap kelompok rentan.

Secara deskriptif, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2021–2025 sebesar 4,84 persen, sedangkan rata-rata inflasi berada pada 2,90 persen. Sementara itu, rata-rata anggaran perlindungan sosial dalam periode yang sama mencapai Rp463,3 triliun. Data ini memperlihatkan adanya hubungan penting antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan fiskal. Ketika inflasi meningkat, pemerintah cenderung memperkuat fungsi fiskal melalui perlindungan sosial agar konsumsi masyarakat tidak turun terlalu dalam. Dengan kata lain, belanja pemerintah berperan sebagai instrumen penyangga untuk menjaga permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu komponen utama pembentuk pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori Keynesian. Keynes (1936) menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga permintaan agregat melalui belanja negara, terutama ketika kondisi ekonomi menghadapi tekanan. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan fiskal melalui belanja perlindungan sosial dapat dipahami sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mempertahankan konsumsi masyarakat. Ketika harga barang meningkat akibat inflasi, bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi dapat membantu masyarakat mempertahankan kemampuan belinya. Oleh karena itu, kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi yang menjaga agar tekanan inflasi tidak langsung menurunkan konsumsi rumah tangga secara signifikan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Damai dan Aprianti (2024) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada sektor pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan fiskal tidak hanya

bekerja melalui peningkatan alokasi anggaran, tetapi juga melalui ketepatan fungsi belanja dalam melindungi kelompok rentan. Namun, temuan Damai dan Aprianti (2024) juga menunjukkan bahwa belanja sektor ekonomi tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, sehingga efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada jenis belanja, sasaran program, dan waktu dampaknya terhadap masyarakat.

Temuan ini juga diperkuat oleh Handayani, Sugianto, dan Saputra (2025) yang menjelaskan bahwa kebijakan fiskal perlindungan sosial memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19. Melalui pendekatan *Computable General Equilibrium*, penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial berkontribusi terhadap kondisi makroekonomi dan peningkatan pendapatan kelompok rumah tangga. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan temuan sebelumnya karena sama-sama menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan instrumen fiskal penting dalam menjaga konsumsi, pendapatan rumah tangga, dan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi.

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya. Anggaran perlindungan sosial yang meningkat belum tentu memberikan dampak optimal apabila tidak disertai dengan ketepatan sasaran, akurasi data penerima manfaat, kecepatan penyaluran, dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, tantangan utama kebijakan fiskal bukan hanya pada alokasi anggaran, tetapi juga pada tata kelola implementasi. Jika bantuan tidak tepat sasaran atau terlambat disalurkan, maka fungsi fiskal sebagai pelindung daya beli masyarakat menjadi kurang efektif.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, tetapi fluktuasi inflasi tetap menjadi ancaman terhadap konsumsi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, belanja perlindungan sosial, subsidi, kompensasi, dan program bantuan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi sekaligus perlindungan sosial. Oleh sebab itu, penguatan kebijakan fiskal perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan anggaran, tetapi juga pada perbaikan kualitas penyaluran, ketepatan sasaran, dan sinergi kebijakan fiskal dengan pengendalian inflasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat Indonesia di tengah tekanan inflasi, terutama melalui belanja perlindungan sosial, subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2021–2026 relatif stabil dikisaran 5 %, fluktuasi inflasi tetap menjadi ancaman terhadap konsumsi rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi makro, tetapi juga sebagai mekanisme

perlindungan sosial untuk menjaga ketahanan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.

### Saran

Pemerintah perlu memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dengan memastikan program perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan sosial disalurkan secara tepat sasaran, cepat, adaptif, dan berbasis data yang akurat. Selain itu, koordinasi antara kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, dan stabilisasi harga kebutuhan pokok perlu ditingkatkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau data empiris rumah tangga agar dampak kebijakan fiskal terhadap daya beli masyarakat dapat diukur secara lebih spesifik dan mendalam.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada lembaga, dosen pembimbing, rekan sejawat, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan dan penelusuran data sekunder dari berbagai sumber resmi. Penulis juga mengapresiasi ketersediaan data dan publikasi dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta sumber ilmiah lainnya yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kajian kebijakan fiskal, inflasi, dan daya beli masyarakat di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik. (2023). *Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31 persen*. Badan Pusat Statistik.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2024). *Ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 tumbuh 5,04 persen (y-on-y)*. Badan Pusat Statistik.
- [3] Badan Pusat Statistik. (2025). *Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh 5,03 persen*. Badan Pusat Statistik.
- [4] Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik.
- [5] Badan Pusat Statistik. (2026b). *Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y)*. Badan Pusat Statistik.
- [6] Badan Pusat Statistik. (2026c). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen*. Badan Pusat Statistik.
- [7] Bank Indonesia. (2026). *Data inflasi*. Bank Indonesia.
- [8] Basconcillo, J. A. Q. (2023). A nexus between fiscal policy and inflation: A case study of Indonesia using SVAR model. *Public Sector Economics*, 47(4), 477–503. <https://doi.org/10.3326/pse.47.4.5>
- [9] Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- [10] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- [11] Damai, A., & Aprianti, Y. (2024). The impact of fiscal policy on the underprivileged population in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 12(3), 321–342. <https://doi.org/10.22437/ppd.v12i3.33824>
- [12] Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- [13] Handayani, R., Sugianto, C., & Saputra, J. (2025). The role of social protection fiscal policy in supporting Indonesia's economic recovery during the COVID-19 pandemic: Evidence from a CGE model. *Journal of Sustainable Economics*, 3(2), 108–114. <https://doi.org/10.32734/jse.v3i2.23503>
- [14] Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurohman. (2024). Indonesia's fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- [15] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Informasi APBN 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [16] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Informasi APBN 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [17] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Informasi APBN tahun anggaran 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [18] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Informasi APBN tahun anggaran 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [19] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Informasi APBN tahun anggaran 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [20] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [21] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN 2026: Tujuan dan arah kebijakan*. *Media Keuangan*.
- [22] Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.
- [23] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- [24] Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- [25] Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>
- [26] Paramita, R. (2021). Effectiveness of fiscal and monetary policies in overcoming inflation in Indonesia 1984–2019 period. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 152–168. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i1.85>
- [27] Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The impact of COVID-19 and social protection programs on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 267–296. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519>